

SYURĀ DAN DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN POLITIK
MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Filsafat Islam (S.Fil.I)

Oleh:

Endrizal

NIM. 03511266

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 10 Mei 2007

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Endrizal

Nim : 03511266

Fakultas : Ushuluddin

Jurusan : Aqidah dan Filsafat

Judul : *Syūrā* dan Demokrasi dalam Pemikiran Politik Muhammad

‘Abid al-Jabairi

Maka selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk dimunaqasyahkan.

Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Drs. Sudin, M. Hum

Nip. 150239744

Pembimbing II



Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag

Nip. 150299964



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/0723/2007

Skripsi dengan judul : *Syūrā* Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Politik
Muhammad 'Abid al-Jabiri

Diajukan oleh :

1. Nama : Endrizal
2. NIM : 03511266
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

Telah dimunaqasyahkan pada hari : Kamis, tanggal : 07 Juni 2007 dengan nilai :
92,5/A dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Sudin, M. Hum
NIP. 150239744

Sekretaris Sidang

H. Shofiyullah Mz., S.Ag. M.Ag
NIP. 150299964

Pembimbing/Merangkap Penguji

Drs. Sudin, M. Hum
NIP. 150239744

Pembantu Pembimbing

H. Shofiyullah Mz., S.Ag. M.Ag
NIP. 150299964

Penguji I

Muh. Fatkhan, S.Ag. M.Hum
NIP. 150292262

Penguji II

H. Zuhri, S.Ag. M.Ag
NIP. 150318017

Yogyakarta, 07 Juni 2007

DEKAN

Drs. H. M. Fahmie, M. Hum
NIP. 150088748

MOTTO

"...pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tak akan pernah menghilang dari muka bumi ini".

Oleh: Abraham Lincoln



Kemerdekaan bagi orang-orang di bawah pemerintahan adalah memiliki aturan tegas sebagai pedoman hidup yang berlaku sama untuk semua masyarakat, dan dibuat oleh kekuasaan legislative yang ditegakkan di dalamnya".

Oleh: Jhon Locke



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk:

- Bapak dan ibuku tercinta, yang telah membimbingku dengan sabar, pengertian, serta penuh kasih sayang merupakan modal dasar untuk menggapai cita-cita.
- Adek-adekku, tanpa kalian sadari, keberadaan kalian menjadi motivasi bagiku dalam menyelesaikan studi ini.
- Almamater Fakultas Ushuluddin, wadahku mencari arti hidup. Tak lupa tentunya pada para dosen yang telah memberiku tongkat penunjuk jalan, dan akhirnya “aku dapat berpikir” sampai hari ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet

س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ك	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ط	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ظ	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya'	Y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------	------	-------------	------

	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *hauला*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	A	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	u	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qala*

قيل ---- *qila*

رامي ---- *rama*

يقول ---- *yaqulu*

3. Ta marbutah

- a. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
- b. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".
- c. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudatul atfal*, atau *raudah al-atfal*

المدينة المنورة ----- *al-Madinatul Munawwarah*, atau *al-Madinah
al- Munawwarah*

طلحة ----- *Talhatu* atau *Talhah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa ma Muhammadun illa rasul*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Diskursus tentang *syūrā* dan demokrasi sampai sekarang masih menjadi tema yang sangat menarik dan masih banyak dibicarakan oleh para intelektual. Baik dari kalangan intelektual muslim sendiri maupun kalangan intelektual Orientalis sekalipun. Sebab, sampai sekarang pemahaman tentang *syūrā* dan demokrasi masih jauh dari yang diharapkan. Setidaknya, dalam memaknai *syūrā* dan demokrasi muncul tiga kelompok. Kelompok *per-tama* adalah kelompok konservatif, yakni golongan ulama klasik (mereka tidak mau menerima tradisi di luar tradisi Islam). Kelompok *ke-dua*, adalah kelompok moderat (orang-orang yang setengah menerima dan setengah menolak). Sedangkan kelompok yang *ke-tiga* adalah kelompok modern (mereka menolak secara mentah-mentah ketika di katakan bahwa *syūrā* sama dengan demokrasi). Pendapat mereka lebih cenderung di dasarkan kepada perbedaan makna dan penerapan *syūrā* dan demokrasi tersebut. Untuk melihat pertarungan yang terjadi antara elit pemikir Islam, maka penulis menyajikan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana *syūrā* dan demokrasi dalam Islam? bagaimana *syūrā* dan demokrasi dalam pandangan Muhammad Abid al-Jabiri dan signifikansinya dengan konteks keindonesiaan?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan murni. Semua karya-karya yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membaca pemikiran tokoh. Untuk menganalisis data penulis mempergunakan metode khusus yaitu, analisis domain dan analisis taksonomi. Sedangkan untuk memudahkan pengolahan data maka, penulis mempergunakan metode deskriptif-interpretatif. Dalam segi pendekatan, penulis menggunakan pendekatan historis-faktual.

Hasil yang didapat adalah, bahwa *syūrā* berbeda dengan demokrasi. Entah itu di lihat dari sejarahnya, maupun penerapannya. Menurut al-Jabiri, jika demokrasi hendak diterapkan di negeri Arab, maka dituntut adanya revolusi sejarah. Revolusi sejarah yang dibutuhkan bangsa Arab mencakup: Revolusi kesadaran yang berpijak pada pemisahan sempurna antara keesaan di bidang ketuhanan dengan sekutu (pluralitas) di bidang kekuasaan dan politik. Revolusi dalam hal pengangkatan penguasa, yakni pengangkatan berdasar pertimbangan "tokoh" menuju pengangkatan berdasar ideologi/kepartaian (mengganti sistem kelompok dan kekerabatan yang kaku menjadi sistem kepartaian yang dinamis). Selain itu, penting bagi bangsa Arab untuk mendirikan "blok historis". Penyatuan dua elemen utama masyarakat yang diwakili oleh "elit modern" dan "elit tradisional". Kelemahan gerakan-gerakan Islam selama ini adalah tiadanya hubungan baik secara organisatoris maupun emosional antara elite modern dengan masyarakat umum.

Sedangkan signifikansi *syūrā* dan demokrasi al-Jabiri dalam konteks keindonesiaan adalah, bahwa system pemerintahan Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, dengan penduduk yang pluralis, mempunyai penduduk muslim terbesar, namun tidak memilih Islam sebagai institusinya, dan tidak memberlakukan syari'at sebagai hukum. Untuk memfasilitasi kemajemukan tersebut agar tidak terjadi konflik, maka demokrasilah jawabannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
اما بعد .

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang lurus.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca, tentu saja kritiknya adalah kritik yang konstruktif dan membangun (*critic to build*) bukan kritik yang menjatuhkan (*critic to down*). Meskipun begitu, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. Fahmi, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushulluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Drs. Sudin, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat dan Bapak Fahrudin Faiz, S. Ag. M. Ag., selaku Sekretaris.
3. Yth. Bapak Drs. Sudin, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Yth. Bapak Shofiyullah, Mz. S.Ag, M,Ag, selaku Penasehat akademik penulis, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan perhatian tanpa henti sepenuhnya. Terima kasih atas bimbinganmu, pengorbanan, do'a dan dukungannya yang selama ini menjadi penguat langkah dan pengobat kegetiran jiwa. Semoga Allah mengasihi keduanya sebagaimana mereka mengasihiku semasa kecilku.
6. Kepada Adek-adekku, terimakasih atas dukungannya, kalian menajdi motivasi tersendiri bagiku.
7. Tak lupa buat almamaterku AF '03, tanpa di sadari dari kalianlah aku banyak belajar.
8. Buat kawan-kawan wisma sakera, kalian telah mengajarkan kepadaku akan arti sebuah kebersamaan.

Buat semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak di sisi Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal 'Alamin.



Yogyakarta, 12 Jumadi al-Awwal 1428 H
29 Mei 2007 M

Penulis



Endrizal



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Metode Penelitian dan pendekatan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PUSARAN INTELEKTUAL MUHAMMAD ‘ABID AL-JABIRI	
A. Setting Biografi al-Jabiri	21
1. Biografi	21
2. Geografi Maroko	25
3. Sosio-Politik Maroko.....	26
B. Latar Belakang Pemikiran Politik	
Muhammad ‘Abid al-Jabiri	32
C. Karya-Karya Muhammad ‘Abid al-Jabiri	36

BAB III AKAR HISTORIS *SYŪRĀ* DAN DEMOKRASI

A. Pengertian <i>Syūrā</i> dan Demokrasi	45
1. Pengertian <i>Syūrā</i>	45
2. Pengertian Demokrasi	47
B. Wacana <i>Syūrā</i> dan Demokrasi	57
1. <i>Syūrā</i> Dalam Tradisi Islam: Dilihat dari Sejarahnya	57
a. <i>Syūrā</i> Pada Masa Klasik	58
b. <i>Syūrā</i> Pada Masa Pertengahan	64
c. <i>Syūrā</i> Pada Masa Modern	66
2. Demokrasi dalam Tradisi Barat: Dilihat dari Sejarahnya	69
a. Demokrasi Pada Masa Klasik	69
b. Demokrasi Pada Masa Pertengahan	72
c. Demokrasi Pada Masa Modern	74
C. <i>Syūrā</i> dan Demokrasi Dalam Pandangan	
Cendekiawan Muslim	76
1. Dalam Pandangan Abu ‘Ala al-Maududi	76
2. Dalam Pandangan Muhammad Said al-Asmawi	84
3. Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid	89

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ‘ABID AL-JABIRI TENTANG *SYŪRĀ* DAN DEMOKRASI

A. Nalar Politik Arab	99
1. Qobilah	99
2. Ghanimah	105
3. Aqidah	110
B. Relasi Agama dan Negara	115
C. <i>Syūrā</i> dan Demokrasi Dalam Islam	127
D. Konsep <i>Syūrā</i> dan Demokrasi Muhammad ‘Abid al-jabiri	
Dalam Kontek Keindonesiaan	140

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 147

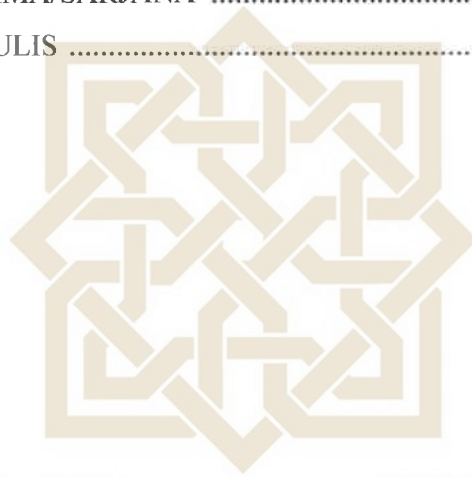
B. Saran-Saran 148

DAFTAR PUSTAKA 150

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA I

BIODATA PENULIS II



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi antara Islam dan demokrasi atau dengan kata lain, potensi demokrasi Islam sebagai sebuah agama, budaya dan peradaban, masih menjadi isu yang sangat kontroversial. Salah satu sisi perdebatan adalah adanya perbedaan yang seringkali dibuat menyangkut nilai-nilai disatu sisi dan teknik pada lain sisi. Teknik-teknik dinyatakan bersifat netral dari sudut pandang agama dan moral, yang berarti pula bisa di ambil dan diadopsi dari masyarakat Barat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang utuh dan tidak diselewengkan. Kenyataan yang melahirkan sikap moderasi, suatu sikap yang dilahirkan dari asumsi, bahwa tidak semua ajaran dalam demokrasi bertentangan secara diametral, melainkan ada kesejajaran dengan Islam dalam pelaksanaan yang bersifat teknis.¹

Namun demikian, demokrasi tidak bisa diadopsi secara mentah-mentah. Sebab, dalam demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. Sebagian pemikir Islam lebih cenderung mengatakan bahwa, sistem pemerintahan yang cocok di dalam Islam adalah

¹ Muhammad Nur, "Islam Berbicara Tentang Cita-cita Politik Indonesia Baru" *Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No.I, 2002, hlm. 110.

“Demokrasi-Teokrasi” (Teo-demokrasi).² Teo-demokrasi pertama kali di perkenalkan oleh Abu ‘Ala al-Maududi.³

Selain persoalan tersebut, yang tak kalah kontroversialnya adalah persoalan perlunya suatu otoritas politik untuk menerapkan seperangkat hukum agama (Islam), sebagian umat Islam merasa Islamnya belum sempurna kalau “Syari’at Islam” tidak diformalkan dalam struktur kenegaraan⁴ sesuatu yang sangat ditentang dalam demokrasi. Sebab, dalam demokrasi tidak boleh ada dominasi politik tertentu, melainkan dalam demokrasi tersebut, haruslah mencerminkan kepentingan seluruh komunitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Sesuatu yang senyatanya mencerminkan paradoksial-paradoksial. Hal ini dapat dilihat, bahwa teori dan praktek hampir tak pernah sejalan. Salah satu contohnya adalah asumsi suara mayoritas dalam pengambilan keputusan. Kenyataan bahwa tidak semua pandangan mayoritas dijadikan keputusan dan hampir semua pandangan mayoritas tertolak dalam pengambilan keputusan.

² Teodemokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari gabungan antara teokrasi dan demokrasi. Lihat, M. Ainul Abied Shah et al, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, cet 1 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 43.

³ Abu ‘Ala al-Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabat, India Tengah, dan wafat tanggal 23 September 1979. Yang dimasuk dengan pemerintahan teodemokrasi dalam Islam adalah kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas. Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5 (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 158-167.

⁴ Rumadi, *Mayarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: PT. Gugus Press, 2002), hlm. 80.

⁵ Sadek Jawad Sulaiman, “Demokrasi dan *Syūrā*” dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, Terj, Bahrul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 124.

Seluruh pandangan kontroversial tersebut, setidaknya telah memformulasikan profil publik ke dalam tiga medan dikotomis, antara yang pro (progresif realistis), setengah menolak-setengah menerima (progresif moderat), dan kontra (progresif radikal). Kelompok yang pro terwakili oleh kelompok yang menganggap, demokrasi adalah sebuah idealitas dan pilihan terbaik dibandingkan sistem politik otoriter. Kelompok kedua berasumsi, di dalam demokrasi terdapat prinsip-prinsip yang boleh diambil dan dijalankan. Sedangkan kelompok yang ke-tiga menganggap, sebagaimana dalam demokrasi yang berisi nilai-nilai dan teknik, maka, di dalam Islam pun terdapat nilai-nilai dan teknik yang antitesis terhadap demokrasi.

Lebih lanjut, kebutuhan institusi politik dalam rangka penerapan supremasi hukum menjadi kebutuhan pokok dan mendesak. Telaahan ke dalam akar demokrasi menjadi sedemikian urgen untuk menemukan realitas demokrasi yang sesungguhnya, serta korelasinya dengan Islam. Apakah korelasi yang positif ataukah negatif.

Para pengkaji dan peneliti Barat dengan gencar melakukan penelitian dan pengkajian tentang masalah tersebut (hubungan antara Islam dan demokrasi). Mayoritas diantara mereka menyimpulkan, adanya pertentangan tajam antara Islam dan demokrasi. Sebab, selama ini dalam tradisi Islam, Tauhid selalu diletakkan pada urutan pertama, sekaligus merupakan konsep inti dari keimanan, tradisi, dan praktik Islam. Sedangkan makna Tauhid itu sendiri, adalah “tidak ada Tuhan selain Allah”, dan konsekuensinya adalah dalam intisari pengalaman keagamaan Islam, hadirilah Tuhan Yang Maha Esa

dan dengan kehendaknya memberikan aturan dan petunjuk bagi kehidupan seluruh manusia. Dengan berpijak pada dasar ini, dalam pengertian filosofi-politik, kaum muslim menegaskan bahwa, hanya ada satu kedaulatan, yakni kedaulatan Tuhan.⁶

Para pengamat dari kalangan Non-Muslim dan tidak ketinggalan juga kalangan Muslim konservatif menarik benang merah yang didasarkan kepada asumsi dan prinsip Tauhid tersebut, bahwa dalam Islam tidak mungkin terjadinya demokrasi. Hal ini di sebabkan oleh konsep kedaulatan rakyat yang diusung oleh teori demokrasi sangat bertentangan sekali dengan konsep Tauhid, yang menjadi landasan keimanan bagi umat muslim.

Bagi kebanyakan orang Barat, konsep “demokrasi Islam” merupakan sesuatu *anatema*.⁷ Dalam setengah abad terakhir ini, demokrasi dalam pengertian modern, telah memperoleh kekuatan hampir universal sebagai ide politik, sebuah inspirasi, dan sebagai sebuah ideologi.⁸ Sebagian orang tidak memandang demokrasi sekarang ini sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan, kerjasama, politik, pluralisme, lain sebagainya. Tetapi, memandangnya sebagai rumusan bagi konsep Barat yang memperburuk citra kaum muslim. Pendapat ini lebih cenderung apologis.

⁶ Muhammad Said al-Ashmawi, “Islam dan Demokrasi” dalam Ulil Abshar-Abdalla (ed.), *Islam dan Barat: Demokrasi Dalam Masyarakat Islam*, cet I (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 7-8.

⁷ John L. Esposito dan John O. vall, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, terjemahan dari *Islam and Democracy* alih bahasa Rahmani Astuti, cet I (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 15.

⁸ Franz Magnis Suseno, “Demokrasi Tantangan Universal”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 122.

Sebab, sampai sekarang, orang Arab (Islam Arab) masih tetap berpegang kepada sejarah masa lalu, ketika Islam memuncaki peradaban umat manusia. Masa lalu dipahami sebagai sebuah alat untuk mengesahkan dan merehabilitasi identitas seseorang.⁹

Demokrasi merupakan sebuah idiom yang oleh sebagian orang dipersepsikan sebagai pilihan sistem politik, menuntut persyaratan bagi terwujudnya sebuah masyarakat madani (*Civil Society*).¹⁰

Dalam perspektif pengelolaan negara bangsa, dimana pluralisme sebagai bagian dari *Sunatullah (Natural law)*, memerlukan negara dan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan dipenuhinya prasyarat *the rule of law*.¹¹ Maka, jika kualitas demokrasi baik, kualitas hukum akan baik, dan jika demokrasi bobrok, hukumnya pun akan jelek.¹² Dengan demikian demokrasi adalah suatu keharusan dan sudah berjalan. Sejelek-jeleknya demokrasi tetapi masih lebih baik dari sistem politik yang lain.

⁹ Muhammad Abid al-Jabiri, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, terj. Burhan, cet. I (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003), hlm. 2.

¹⁰ *Civil society* adalah suatu lingkungan tempat warga negara mengembangkan diri secara swadaya di luar lingkungan keluarga dan bebas dari kendali negara. *Civil society* adalah pra kondisi bagi munculnya demokrasi. *Civil society* merupakan jaminan bahwa kediktatoran tidak akan terjadi. *Civil society* berfungsi mendukung demokrasi, bukan hanya untuk kaum elite, tetapi untuk segenap warga negara. Lihat Mohtar Mas'ood, "Civil society dan Masyarakat Madani : catatan untuk diskusi", makalah disampaikan pada seminar tentang "Menata kapasitas Masyarakat Madani menghadapi tantangan global," sebagai pemakalah, Yogyakarta, 9 April 2002, hlm. 1 dan 5

¹¹ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. IX.

¹² Moh. Mahfud, MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 48.

Ketangguhan demokrasi ada pada aspek *rationalitas* yang dapat dikritik dan diperdebatkan (*rational discourse*) dan adanya kontrol dari rakyat.¹³

Sedangkan di dalam lingkungan Islam, kata demokrasi seringkali di sejajarkan dengan kata-kata *syūrā* (Musyawarah). Tidak sedikit para intelektual muslim yang mengklaim, bahwa *syūrā* merupakan demokrasi di dalam Islam. Seiring dengan banyaknya yang mendukung kata-kata *syūrā* sama dengan demokrasi, maka membuat sebagian pemikir besar Islam angkat bicara, salah satunya Muhammad Abid al-Jabiri.¹⁴ Al-Jabiri tidak dengan gampang menerima konsep *syūrā* (musyawarah) dalam tradisi Islam adalah sama dengan demokrasi. Menurutnya, pendapat semacam itu *a-historis*.¹⁵ *Syūrā* pada mulanya hanyalah berarti konsultasi yang tidak mengikat sang pemimpin untuk melakukan atau tidak melakukan hasil konsultasi.¹⁶ Ini tentu berbeda dengan demokrasi, di mana, keputusan wakil rakyat adalah bersifat mengikat. Artinya, seorang pemimpin harus melaksanakan hasil musyawarah dan jika tidak maka, pemimpin tersebut telah melanggar demokrasi, kaidah dan aturan yang telah disepakati dalam demokrasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA

¹³ Kutut Suwondo, "Desentralisasi dan Demokrasi Lokal", Makalah disampaikan pada seminar sehari dan peluncuran buku tentang "Demiliterisasi, Demokratisasi, dan Desentralisasi" sebagai pemakalah, Yogyakarta, 12 Juni 2002, hlm. 4.

¹⁴ Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, Muhammad Abid al-Jabiri ditulis al-Jabiri.

¹⁵ Muhammad Abid al-Jabiri, *Syūrā, Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 26.

¹⁶ Muhammad Abid Al-Jābirī, *ad-Dimuqrāṭiyah wa huq-q al-Insān* (Beirut: Markaz al-Wihdah al-Ārabiyyah, 1994), hlm. 42.

Kalau kita kembali kepada makna dasar dari *syūrā* sendiri yang berarti, meminta pendapat kepada *Ahl al-Ḥall wal-A'qd*¹⁷ yang terdiri dari para ulama, fuqaha, pemuka-pemuka masyarakat, sebelum melakukan tindakan apapun. *Syūrā* dalam pengertian ini, tidak mengikat penguasa: ia memang melakukan konsultasi, namun, keputusan akhir tetap berada di tangannya sendiri, baik keputusan itu merupakan hasil konsultasi, atau tidak sesuai dengan hasil konsultasi tersebut.

Hal ini karena *syūrā*, sebagaimana dalam rujukan bahasa, berasal dari kata *syārā* yang berarti mengambil. Contoh yang dikemukakan oleh kamus-kamus dalam menjelaskan arti kata ini adalah perkataan orang Arab: *Syartu al-'Asāl* artinya, aku mengambil madu dari tempatnya, juga ungkapan *Syāwartu Fulānan* artinya, aku mengemukakan pendapatku dan pendapatnya. Dengan demikian, menurut al-Jabiri, *syūrā* artinya mengambil sesuatu dari tempatnya, yaitu kepada seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya. Mengambil pendapat seseorang sama sekali tidak berarti, adanya *keharusan* mengikuti pendapat tersebut, sebagaimana “Orang-orang yang diambil pendapatnya” juga sama sekali tidak ditentukan dan dibatasi.¹⁸

Jadi, *syūrā* itu bukan hanya tidak mengikat penguasa, tapi juga tidak memberikan penentuan mengenai siapa yang harus diajak bermusyawarah selain istilah umum: *Ahl Ḥall wa al-'Aqd*. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah, setiap orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat baik karena

¹⁷ Muhammad Abid al-Jabiri, *Syūrā, Tradisi.....*, hlm. 25.

¹⁸ *Loc. Cit.*

ilmu, hubungan sosial, ekonomi atau agama, namun tanpa adanya batasan kuantitas, kualitas, ruang ataupun waktu.

Sedangkan demokrasi memiliki pola yang berbeda dengan *syūrā*, baik dalam pengalaman historis Eropa maupun, dalam aplikasinya. Secara historis, demokrasi pertama kali muncul di Yunani dan kemudian disusul oleh bangsa Romawi. Demokrasi berkaitan erat dengan kehancuran sistem kesukuan dan pudarnya kekuasaan kepala suku, dan sebagai gantinya munculah fenomena “masyarakat sipil” dan gagasan tentang “warga negara”.¹⁹

Pada saat agama Kristen tampil, negara dan imperium benar-benar kokoh, agama menjadi medium resistensi terhadap kekuasaan imperium. Ini adalah awal dari rangkaian konflik yang sangat panjang antara agama dan negara, di mana masing-masing ingin membatasi kekuasaan yang lain dan ingin menjadikan kekuasaannya di atas kekuasaan lainnya. Konflik seperti yang terjadi antara penguasa dan gereja ini, juga terjadi pada kaum feodal melawan “para feodal besar” yang berkuasa atas nama mereka, dengan bertopang pada fasilitas, alat-alat, uang dan tentara yang mereka kuasai. Konflik ini terus menerus terjadi sebagai satu bentuk pembatasan wilayah kekuasaan. Konflik ini kemudian melahirkan dewan-dewan “perwakilan” yang bersifat lokal maupun umum.

Sedangkan di abad modern, dimulai pada abad 17, konflik melawan kekuasaan tiranik semakin meluas dan mendalam, seiring dengan munculnya kekuatan-kekuatan sipil, terbentuknya kelompok-kelompok pedagang dan

¹⁹ Dawam Raharjo, “Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal” dalam Paramadina, Vol. I, No. 1, 1999, hlm. 24.

kaum pengusaha industri sebagai kekuatan sosial, yang kemudian menjadi kelas borjuis dan membawa panji perjuangan demi demokrasi, dalam arti kontemporer, yaitu, demokrasi berarti, membangun pemerintahan melalui proses pemilihan bebas, adanya pengawasan terhadap penguasa dan pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁰ Demikianlah, al-Jabiri menyimpulkan bahwa, *syūrā* berbeda dengan demokrasi.

Al-Jabiri menjelaskan bahwa, para pemikir yang menyamakan antara *syūrā* dan demokrasi, itu biasanya bersandar pada al Qur'an, khususnya Ali Imran (3) : 159 dan *al-syūrā* (42) : 38. Karena itulah, mereka berani mengklaim bahwa, tradisi "bermusyawarah" yang merupakan "ruh" dari demokrasi sudah lama dipraktekkan umat Islam. Pemikiran seperti ini dinilai al-Jabiri *apologis* dan *a historis*, karena tidak mendudukan konsep tersebut sesuai dengan konteks historisnya dengan objektif.

Al-Jabiri melihat ayat itu secara berbeda. Menurutnya, kalau ditelaah secara mendalam, baik dalam ruang lingkup bahasa maupun konteks pembicaraan ayat sebelumnya, ayat-ayat tersebut tidak memungkinkan akan adanya pengambilan keputusan yang cermat dan terlepas dari penguasa, sebagaimana yang selayaknya dalam demokrasi.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32. Konsep pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pertama kali di kembangkan oleh Montesquieu, seorang sarjana Perancis. Menurutnya, kekuasaan negara haruslah dipisah-pisah kedalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau "*legislature*", fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah, sedangkan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. Lihat S.E. Finer dkk, *Comparing Constitutions* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 27.

²¹ Muhammad Abid al-Jabiri, *Syūrā Tradisi*,....., hlm. 26-27.

Sedangkan dari konteks pembicaraan ayat sebelumnya, ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa, perintah itu merupakan *suatu keharusan*. Hal ini tampak dari penjelasan para mufasir. Sebagian mufasir menjelaskan firman Allah “*maafkan mereka, mintakan ampun buat mereka dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka mengenai urusan itu*” sebagai berikut: pembicaraan ayat itu ditujukan kepada Nabi, sedangkan kata “mereka” dalam ayat itu merujuk kepada kaum muslim yang saat itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi, pengertian ayat ini adalah “maafkan mereka” atas kesalahan mereka padamu, dan “mintakan ampun kepada Allah” atas kesalahan mereka kepadaNya, sebagai tanda kasih sayangmu pada mereka, serta “Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini” yaitu, dalam masalah perang dan sejenisnya, jika tidak ada wahyu turun kepadamu, agar hati mereka senang dan merasa dihargai. Sedangkan ayat “*Dan mereka bermusyawarah tentang masalah di antara mereka*”, sebenarnya berbicara tentang ciri-ciri orang beriman secara umum, bukan tentang penguasa secara khusus, yang berarti bahwa, *syūrā* merupakan keutamaan bagi setiap orang beriman. Seorang mukmin selalu bermusyawarah dengan saudaranya yang mukmin, mengenai apa saja yang ingin ia lakukan, tetapi, melaksanakan hasil musyawarah itu tidaklah suatu keharusan.

Dengan demikian, apa yang seharusnya dilakukan seorang penguasa hanyalah melaksanakan musyawarah, sedangkan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil harus “dipikul” penguasa itu sendiri, dan mereka yang dimintai pendapatnya dalam musyawarah itu tidaklah bertanggung jawab,

walaupun keputusan yang diambil itu merupakan hasil musyawarah tersebut. Menurut al-Jabiri, inilah konsep *syūrā* yang dominan dalam otoritas tradisi, sebuah konsep yang berada dalam ruang lingkup “kemuliaan akhlak” dan “kesopanan adat istiadat” dan bukan dalam ruang lingkup kewajiban dan keharusan.²²

Al-Jabiri dan proyek nalar Arab, serta berbagai pemikirannya, barulah dikenal di Indonesia pada sekitar akhir tahun 90-an.²³ Sikap yang dikembangkannya adalah terbuka kepada ide-ide liberal Barat dengan kritis tanpa sedikitpun merasa terancam kehilangan identitas keislamannya.²⁴ Sejauh yang dapat diketahui, ia bukan seorang politisi, bahkan bisa dikatakan pemikir murni. Tentu saja, pemosisian seperti ini tidak bermaksud menafikan nilai politis dari pemikirannya. Cita-cita besarnya adalah terwujudnya nasionalisme Arab dengan adanya semacam “Negara Arab Serikat” yang mempersatukan bangsa-bangsa berbahasa Arab dalam ikatan kearaban (mungkin sejenis Uni Eropa yang secara simbolik disatukan oleh mata uang Euro).²⁵ Persatuan bangsa-bangsa Arab, bukan dalam artian harus adanya satu kepemimpinan untuk seluruh negara, melainkan, adanya kepentingan yang sama dalam

²² *Ibid.*, hlm. 27.

²³ Untuk Biografi dan Pemikiran Politikanya lihat misalnya, Najib Kailani, *Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid al Jabiri* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002), skripsi tidak terbit.

²⁴ Mujiburrahman, “Muhammad Abid al Jabiri dan Proyek Kebangkitan Islam”, Pengantar Penerjemah dalam “Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*”, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. xxvi.

²⁵ Mujiburrahman, “Memadukan Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun”, Pengantar Penerjemah, dalam Muhammad Abid al-Jabiri, *Syūrā, Tradisi.....* (Yogyakarta: LKiS, 2003) hlm. xii.

rangka keluar dari berbagai kungkungan krisis dan tirani. Dengan demikian, ia dapat dikatakan sebagai seorang nasionalis Arab.²⁶

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini yakni:

1. Bagaimana sejarah perkembangan *syūrā* dan demokrasi dalam Islam?
2. Bagaimana *syūrā* dan demokrasi dalam pemikiran politik Muhammad Abid al-Jabiri dan signifikansinya dengan demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sedangkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memahami pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri tentang *syūrā* dan demokrasi, sekaligus melihat bagaimana signifikansi *syūrā* dan demokrasi al-Jabiri dalam konteks Indonesia. Sebab, sampai sekarang, perdebatan tentang sistem pemerintahan di negara Islam pada umumnya dan negara Arab pada khususnya, masih belum menemukan kata sepakat, antara memakai kata *syūrā* atau demokrasi.

²⁶ Ahmad Baso, "Posmodernisme Sebagai Kritik Islam : Kontribusi Metodologis "Kritik Nalar" Muhammad Abid al-Jabiri", Dalam Kata Pengantar Penerjemah Muhammad Abid al-Jabiri, *Post-Tradisionalisme Islam* hlm, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. ix.

D. Metode dan Pendekatan Penelitian

Menurut sumber bacaan yang ada, metodologi penelitian merupakan serangkaian metode yang saling melengkapi dalam melakukan penelitian.²⁷ Sifat dari penelitian ini sendiri adalah kajian kepustakaan (*Library Research*) yang memuat data-data dan bahan-bahan yang mendukung dan melengkapi terhadap isi pembahasan ini, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, artikel, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam proses pengumpulan data-data tersebut, penulis berusaha untuk menghimpun data primer maupun sekunder yang sekiranya ada kaitannya dengan pokok pembicaraan dalam skripsi ini. Data primer itu berupa buku al-Jabiri sendiri yang berjudul *ad-Dīmuqrāthiyyah wa Huqūq al-Insān* (Demokrasi dan Hak Asasi Manusia). Sedangkan data sekunder adalah berupa karya-karya al-Jabiri lainnya yang dilengkapi pula dengan tulisan atau karya ilmiah para ahli yang secara khusus mengkaji dan membahas tentang pemikiran al-Jabiri.

Adapun untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul penulis menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. analisis domain (*Domain Analysis*); analisis ini digunakan dalam upaya menemukan gambaran yang menyeluruh pemikiran sang tokoh yang diteliti.
2. analisis taksonomi (*Taxonomy analysis*); analisis yang tidak hanya berupa penjelajahan umum, melainkan analisis yang memusatkan perhatian pada

²⁷ Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin, 2002), hlm. 9.

domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi objek kajian studi.²⁸

Disamping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian filosofis-historis mengenai seorang tokoh, dalam hal ini al-Jabiri. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *filosofis-historis*, karena penelitian ini sifatnya *tematik-tokoh*. Filosofis berarti, melakukan telaah atas bangunan pemikiran sang tokoh al-Jabiri dengan melihat kerangka teoritis yang digunakan di dalam menganalisis data-data, maupun fakta-fakta, berkisar problem yang dihadapi, sehingga nantinya akan terlihat kerangka maupun alur dari pemikiran tokoh.²⁹

Sedangkan historis, dimaksudkan untuk menempatkan sang tokoh dalam batasan ruang dan waktu tertentu. Artinya, di sini sang tokoh tidak sekedar dilihat hanya pada batasan pemikiran filosofisnya saja, tetapi lebih jauh dari itu, untuk melihat latar belakangnya, guna mengetahui sebab-sebab orientasinya dalam melihat realitas yang sedang berlangsung maka, dalam hal ini adalah realitas (*al-wāqi'*) dunia Arab saat ini.

Untuk mempermudah prosedur pengolahan data itu, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

- 1) *Deskriptif*; dalam hal ini peneliti sedapat mungkin menguraikan dan mengungkapkan pemikiran tokoh agar data-data maupun problem permasalahan nantinya dapat terkumpul. Unsur ini digunakan untuk

²⁸ Anton Bakker dan A. Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61.

²⁹ *Ibid.*, 64-66.

memaparkan terutama sekali biografi tokoh objek kajian. Dan hal ini agar mampu menyingkap latar belakang, konteks, dan alur pemikiran sang tokoh.

- 2) *Interpretatif*, berarti menginterpretasikan pemikiran tentang *syūrā* dan demokrasi dalam pemikiran sang tokoh. Namun, interpretasi ini dilakukan masih dalam batasan alur pemikiran. Hal ini dilakukan guna menemukan maksud apa yang dipikirkan oleh tokoh tersebut.³⁰ Dengan begitu, diharapkan nantinya akan bisa diperoleh suatu pemahaman yang benar pula tentang ciri, sifat, latar belakang dan ide-ide dasar al-Jabiri sendiri terlebih lagi ide al-Jabiri mengenai *syūrā* dan demokrasi.

E. Tinjauan Pustaka

Penyusun mencoba mengkaji dan menyajikan pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri, utamanya dalam perjuangannya yang gigih dalam menegakkan demokrasi. Memang sudah cukup banyak buku-buku atau tulisan yang membedah tentang pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri, diantaranya :

Buku yang ditulis oleh Ahmad Baso “Posmodernisme Sebagai Kritik Islam Kontribusi Metodologis” “Kritik Nalar Muhammad Abid al-Jabiri”.³¹. Selanjutnya, “Kritik Nalar al-Jabiri, Sumber, Batas-batas dan Manifestasi”.³²

³⁰ *Ibid.*, 63-65.

³¹ Ahmad Baso “Posmodernisme Sebagai Kritik Islam Kontribusi Metodologis” “Kritik Nalar Muhammad Abid al-Jabiri” (Pengantar Penerjemah) dalam “*Post Tradisionalisme Islam*” (Yogyakarta: LKiS, 2000).

³² Ahmad Baso “Kritik Nalar al-Jabiri, Sumber, Batas-batas dan Manifestasi” dalam *Jurnal Teks, Research For Quranic Studies* (Bandung: Pasca Sarjana IAIN Gunung Jati, 2002).

Pada tulisan pertama Baso banyak mengurai pemikiran al-Jabiri di wilayah kritik epistemologi, beserta beberapa pendekatan yang di terapkannya. Namun, di sini dia tidak pernah menyentuh pemikiran politik, terlebih lagi masalah *syūrā* dan demokrasi. Sedangkan pada bagian yang kedua menyangkut ideologi kesultanan dan fiqh politik.

Masih pada tulisan Baso yang berjudul “Problem Islam dan Politik Perspektif ”Kritik Nalar Politik” al-Jabiri”.³³ Baso mencoba untuk mengupas pemikiran politik al-Jabiri secara umum, bisa di katakan bahwa tulisan tersebut hanya sebagai pengantar guna mengenal pemikiran politik al-Jabiri, walaupun dalam tulisan tersebut meyinggung masalah demokrasi, civil society, dan HAM.

Mujiburrahman “Muhammad Abid al-Jabiri dan Proyek kebangkitan Islam”.³⁴ Memaparkan pendekatan yang digunakan oleh al-Jabiri dalam membaca tradisi Islam. Dalam tulisan Mujiburrahman ini, hanya memberikan gambaran secara umum, tentang metode dan pendekatan yang di gunakan oleh al-Jabiri dalam membaca tradisi. Bisa dikatakan, bahwa tulisan ini, hanya bersifat umum dan tidak membahas pemikiran politik al-Jabiri secara mendalam.

³³ Ahmad Baso “Problem Islam dan Politik Perspektif ”Kritik Nalar Politik” al-Jabiri” dalam Taswirul Afkar, Jakarta, edisi 4. 1999.

³⁴ Mujiburrahman “Muhammad Abid al-Jabiri dan Proyek kebangkitan Islam” (Pengantar Penerjemah) dalam “*Muhammad Abid al-Jabiri, Agama, dan Penerapan Syaria'ah*” (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001).

Sedangkan tulisan yang lainnya, Review seri kritik nalar Arab “*Takwin al-Aql al-Arabi*” “Islam Berangkat dari Nalar Arab”.³⁵

Selanjutnya, tulisan Muhammad Aunul Abid Shah dan Sulaiman Mappiasse “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik al-Jabiri” dalam “*Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*”.³⁶ Buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang diambil dari beberapa penulis tentang tokoh-tokoh pemikir Islam. Muhammad Aunul Abid Shah membahas tentang pemikiran Al-Jabiri tentang Kritik Nalar Arab. Dalam tulisan ini titik tekannya lebih kepada nalar Arabnya, atau kajian epistemologi pemikiran al-Jabiri.

Nirwan Syafrin, Kritik terhadap “*Kritik Nalar Islam*” al-Jabiri.³⁷ Namun sebenarnya tulisan ini adalah hanya sebatas pada *review* buku karangan al-Jabiri “*Takwin al-‘Aqli al-‘Arabiyy*”. Memang pada akhir tulisannya, Nirwan mengkritik al-Jabiri dengan meminjam kerangka teori kritik George Tharabisyi yang dilakukannya untuk mengkritik konsep “nalar” yang diaplikasikan untuk membaca struktur atau paradigma keilmuan di Arab.

Novriantoni Kahar menulis “*al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam*”

³⁵ Syafiq Hasyim “Takwin al-aql al-arabi”, “Islam Berangkat dari Nalar Arab” dalam Tashwirul Afkar, edisi 2, 1990.

³⁶ Muhammad Aunul Shah dan Sulaiman Mappiasse “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik al-Jabiri” dalam “*Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*” (Bandung: Mizan, 2001).

³⁷ Nirwan Syafrin, Kritik terhadap “*Kritik Nalar Islam*” al-Jabiri dalam Islamia, THN I NO.2/Juni-Agustus, 2004.

Sebuah Penjajakan Awal”,³⁸ tulisan ini bisa dikatakan sebagai ringkasan atas karya al-Jabiri; *al-‘Aqlu al-Siyāsiy al-‘Arabiy*. Dalam tulisan tersebut hanya sebatas deskripsi teori-teori yang digunakan al-Jabiri dalam bukunya itu. Kalau pun demikian, tulisan ini sangat sistematis dalam menguraikan struktur teori yang diaplikasikan ranah politik Arab-Islam. Namun, bagaimana pun juga tulisan ini masih pada tataran pengantar untuk menjajaki atau menyelami pemikiran politik Muhammad Abid al-Jabiri.

Selain berupa buku, ada juga yang membahas pemikiran al-Jabiri dalam bentuk Skripsi, di antaranya skripsi saudara Muhammad Abduh, “*Format Ideal Demokrasi Di dunia Arab (Tela’ah atas Pemikiran Politik al-Jabiri)*”.³⁹ Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan penelitiannya kepada bentuk ideal dari demokrasi di dunia Arab, dan mencari model demokrasi yang cocok dengan dunia kultur dan budaya Arab.

Skripsi Muhammad Anas dengan judul “*Kritik Ilmu Pengetahuan Jurgen Habermas dan Abid al-Jabiri (Studi Komparasi Epistemologi)*”.⁴⁰ Skripsi yang ditulis oleh Zayyin Alfi Jihad “*Intuisi Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri*”.⁴¹ *Kritik Epistemologi Nalar Arab Menurut Abid Al-Jabiri* yang

³⁸ Novriantoni Kahar dalam “*al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam: Sebuah Penjajakan Awal*”, yang merupakan review atas buku *al-‘Aqlu al-Siyāsiy al-‘Arabiy*. Dalam Makalah Diskusi Teater Utan Kayu, 30 Juni 2004.

³⁹ Muhammad Abduh, *Format Ideal Demokrasi Di dunia Arab: Tela’ah Atas Pemikiran Politik Al-Jabiri*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005).

⁴⁰ Muhammad Anas, *Kritik Ilmu Pengetahuan Jurgen Habermas dan Abid Al-Jabiri: Studi Komparasi Epistemologi*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005).

⁴¹ Zayyin Alfi Jihad, *Intuisi Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004).

ditulis oleh Zulfikar.⁴² “*Pemikiran Politik Islam al-Jabiri*” yang ditulis oleh Najib Kailani.⁴³

Sepengetahuan penulis hingga saat ini, belum ada orang yang meneliti tentang demokrasi dan syura dalam pemikiran politik Muhammad Abid Al-Jabiri yang mengkaji secara khusus dan mendalam. Seperti judul penelitian ini.

Di sini penulis berangkat dari literatur-literatur primer yang menjadi acuan sekaligus rujukan bagi penulis adalah karya Al-Jabiri yang berjudul, *ad-dimūqratiyyāh wa Huqūq al-Insān*.⁴⁴ di samping itu penulis juga mempergunakan karya al-Jabiri yang lain yang berjudul, *al-Aqlu al-Siasiy al-Arabiyya*.⁴⁵ Selain mempergunakan data-data primer yang telah penulis sebutkan *di atas*, penulisan karya ilmiah ini juga didukung oleh beberapa data sekunder lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman isi dan esensi dari skripsi ini. Maka deskripsi ini akan disistematisasikan penyajiannya berdasarkan kategorisasi pembahasan sebagai berikut:

⁴² Zulfikar, *Kritik Epistemologi Nalar Arab Menurut Abid Al-Jabiri*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2001).

⁴³ Najib Kailani, *Pemikiran Politik Islam al-Jabiri*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2002).

⁴⁴ Muhammad Abid al-Jabiri, *ad-Dimūqratiyyāh wa Huqūq al-Insān* (Beirut: Marqaz Dirasah al-wildah al-arabiyah, 1997).

⁴⁵ Muhammad Abid al-Jabiri, *al-Aqlu al-Siasiy al-Arabiyya* (Beirut: Marqas Dirasah al-Wildah al-Arabi, 1990).

Diawali dengan *Bab I*, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Kemudian *Bab II*, sketsa biografi, kondisi sosial, politik, dan karya-karya Al-Jabiri. Selanjutnya *Bab III*, akar historis *syūrā* dan demokrasi. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengeksplorasi pengertian *syūrā* dan demokrasi dilihat dari tradisi Islam dan Barat, sekaligus respon intelektual Islam terhadap demokrasi dan *syūrā*. Hal ini dilakukan guna memberikan gambaran umum tentang *syūrā* dan demokrasi, sebab, sampai sekarang pemaknaan *syūrā* dan demokrasi masih menjadi perdebatan dalam dunia intelektual.

Disusul dengan *Bab IV*, yang merupakan intisari pembahasan yang menengahkan tentang pandangan Muhammad Abid al-Jabiri tentang *syūrā* dan demokrasi. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menengahkan beberapa persoalan yang sekiranya bisa menjawab dari rumusan masalah yang penulis berikan di atas. Bab ini meliputi: a) nalar politik Arab, yang mencakup tentang qabilah, ghanimah, dan aqidah. Tiga hal inilah yang mejadi landasan bagi pemikiran politik Al-Jabiri. b) relasi agama dan negara, c) *syūrā* dan demokrasi dalam Islam, d) konsep *syūrā* dan demokrasi al-Jabiri dalam kontek keindonesiaan.

Terakhir *Bab V*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis berdasarkan seluruh hasil pembahasan yang dilakukan dan ditekuni selama dalam proses awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap konsep *syūrā* dan demokrasi menurut Muhammad ‘Abid al-Jabiri, secara umum dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

Al-Jabiri sangat tegas memberikan pembedaan antara *syūrā* dan demokrasi. Demokrasi dalam pandangan al-Jabiri merupakan suatu sistem politik, ekonomi, dan sosial yang dibangun di atas beberapa pilar: Hak Asasi Manusia berupa kebebasan dan persamaan serta derivasi dari keduanya. Adanya berbagai lembaga negara yang eksistensinya terdiri atas lembaga-lembaga politik dan sipil yang melampaui individu-individu. Adanya perputaran kekuasaan (di lembaga-lembaga negara) antar berbagai kekuatan politik atas dasar suara mayoritas dengan tetap menjaga hak-hak minoritas. Demokrasi yang selama ini dipahami oleh bangsa Arab dapat dilihat dari dua otoritas yang berbeda: otoritas tradisi dan otoritas *renaissance*.

Bila demokrasi hendak diterapkan di negeri Arab, dan itu memang kebutuhan bangsa Arab saat ini, maka dituntut adanya revolusi sejarah. Revolusi sejarah yang dibutuhkan bangsa Arab mencakup: Revolusi kesadaran yang berpijak pada pemisahan sempurna antara keesaan di bidang ketuhanan dengan sekutu (pluralitas) di bidang kekuasaan dan politik.

Kalau kita melihat signifikansi konsep *syūrā* dan demokrasi al-Jabiri dengan kondisi Indonesia yang plural, beragam bahasa, budaya, etnis, agama,

menghendaki adanya pemerintahan representatif yang mewakili beragam entitas yang ada maka demokrasi adalah wadah yang bisa menjembatani hal ini. Bila cukup jeli mengamati, Indonesia sebenarnya sudah mulai dan masih terus merintis apa yang disebut al-Jabiri sebagai mendirikan “blok historis”. Indonesia telah mengalami “bongkar pasang” model pemerintahan, dari demokrasi parlementer sampai presidensial. Setidaknya Indonesia telah menerapkan, untuk tidak mengatakan menemukan, mekanisme pemilihan kepala Negara dan kepala daerah “secara langsung”. Indonesia juga tidak melegalkan pemerintahan oposisi yang berujung pada in-efisiensi pemerintahan.

Penggalian dan pemaknaan harus tetap dilakukan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa, zaman akan terus bergerak, masa berubah, generasinya pun berganti, sehingga apa yang sekarang pantas dan tepat, untuk beberapa tahun atau puluhan tahun mendatang belum tentu akan sesuai.

B. Saran-Saran

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari, bahwa telaah ini belum cukup mampu mengungkap secara detil dan komprehensif pemikiran Muhammad ‘Abid al-Jabiri tentang *syūrā* dan demokrasi. Untuk itu, kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi-studi lain mengenai pemikiran Muhammad ‘Abid al-Jabiri secara lebih utuh dan memadai.

Dari seluruh rangkaian hasil kajian di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan ditindak-lanjuti, antara lain:

1. Kesulitan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini ialah bagaimana mengimplementasikan *syūrā* dan demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan, terlebih lagi dalam masalah sosial dan pemerintahan. Sekaligus, umat Muslim harus membuka pikiran mereka dalam menafsirkan kembali al-Qur'an dan Sunnah.
2. Al-Quran dan Sunnah harus direinterpretasikan secara terbuka, mengingat penafsiran dan pemahaman yang dilakukan oleh sebagian cendekiawan muslim sekarang ini lebih mengedepankan pemahaman yang rigid, tekstual dan baku, akibatnya *syūrā* dalam Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sekaligus membuat makna *syūrā* selalu bersifat statis dan tidak sesuai dengan makna dan penerapan demokrasi.
3. Pendekatan al-Jabiri dalam menginterpretasikan teks al-Quran dan Sunnah secara historis sosiologis memerlukan kajian lebih lanjut. Karena hal ini menyangkut latar belakang pewahyuan, kondisi sosial dan sejarah hidup Nabi. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan *asbāb an-nuzūl* sebagai alat yang paling representatif dan obyektif dalam memaparkan kondisi sosiologis turunnya al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kelompok Buku

'Abied Shah, M. Ainul (et.al.), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, cet 1, Bandung: Mizan, 2001.

Abshar-Abdalla, Ulil (ed.), *Islam dan Barat: Demokrasi Dalam Masyarakat Islam*, cet I, Jakarta: Paramadina, 2002.

Abu Fariz, Muhammad Abdul Qadir, *Sistem Politik Islam*, terj. Musthala Maufur, Jakarta: Rabbani Press, 2000

Abi al-Qasim Bin Muhammad Ma'arif Bin al-Rahib al-Asfahani, *Mufrādād fi Garīf al-Qur'an*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1991.

Ahmad, Mumtaz (ed.), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1996.

Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam III: Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan dari Zaman ke Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Al-Asymawi, Muhammad Sa'id, *Menentang Islam Politik*, alih bahasa Widyawati, Bandung : Alifya, 2004.

Al-Maqdudi, Abu 'Ala, *The Islamic Law and Constitution*, cet. ke-6, Lahore: Islamic Publication Limited, 1977.

Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *ad-Dimuqrāṭiyah wa huq-q al-Insān*, Beirut: Markaz al-Wihdah al-Ārabiyyah, 1994.

_____, *al-'Aqlu al-Siyāsī al-'Arabiyyah*, Beirut: Markaz al-Wihdah al-Ārabiyyah, 1990.

_____, *Bunyah 'Aql Arabī: Dirāsah Tahfiliyyah Naqdiyyah Li Nuzm al-Ma'rifah Fi al-Saqāfah al-Arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-arabiyyah, 1986.

_____, *Post-Tradisionalisme Islam*, terj, Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.

- _____, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- _____, *Syūrā Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- _____, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, terj. Burhan, cet.I, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003.
- _____, *Nalar filsafat & Teologi Islam*, terj. Aksin Wijaya, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan,: Keharusan Demokrasi dalam Islam Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Apte, David E., *Pengantar Analisa Politik*, terj. Setiawan Abdi, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Armstrong, Karen, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*. Terj. Sirikit Syah, cet. III, Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- _____, *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, cet I, Bandung: Mizan, 2005.
- Bakker, Anton dan A. Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Badudu, J. S. dan Sultan Muhammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bagus, Lorrens, *Kamus Filsafat*, cet, III, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Buharjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Budiman, Arif, *Teori Negara: Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Dahl, Robert A., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Insiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Diamond, Larry dalam "Pengantar Edisi Bahasa Indonesia", *Developing Democracy: Toward Consolidation*, alih bahasa oleh Tim IRE Press, Yogyakarta: IRE Press, 2003.

- Dwyer, Kevin, *Arab Voices The Human Right Debate In The Middle East*, Berkeley Los Angles: University of California Press, 1991.
- Eko, Sutoro, "Pelajaran Konsolidasi Demokrasi Untuk Indonesia." Dalam pengantar buku terjemahan Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Esposito, John L. dan John O. vall, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, Terj, Rahmani Astuti, cet. I, Bandung: Mizan, 1999.
- Finer, S.E., (et.al.), *Comparing Constitutions*, Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Fukuyama, Francis, *The End Of histori And The last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj, M.H. Amrullah, cet III, Yogyakarta: CV. Qolam, 2004.
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Hukum di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hermawan, Eman, *Demokrasi Untuk Pemula*, Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi Kedaulatan Rakyat, 2000.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hook, Sidney, "Demokrasi: Sebuah Tinjauan Umum", menegakkan demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Kelompok Studi Indonesia, 1989.
- Huwaidi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shaleh Isre, Muh. (ed.), *Prisma Pemikiran Gus Dur*, cet.II, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Tela'ah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Karim, Khalil Abdul, *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*, terj. Kamran As'ad Irsyady, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- _____, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan*, Terj. M. Faisol Fatawi, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.

- Khaldun, Ibn, *Mukadimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Kurzman, Charles, (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, (et.al.), Jakarta: Paramadina, 2001.
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Lewis, Bernar, (et.al.) *Islam, Liberalisme, Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Kontek Global*, terj. Mun'im A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Lincoln dalam pidato yang hanya dua menit pada saat peresmian makam pahlawan di Gettysburg Juli 1863.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, cet. I, Bandung : Alumni, 1975.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet.II, Jakarta: Paramadina, 2002.
- _____, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahfud, MD. Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet I, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mernissi, Fatima, *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*, terj. Amiruddin Arrani, cet, I, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- O'Donnell, Guillermo dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, cet.I, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Rais, Dhiaudin. M., *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahmena, Ali, (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, cet.II, Bandung: Mizan, 1996.

- Rahman, Fazlur, "Prinsip-Prinsip *syūrā* dan Peranan Umat Dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Revitch, Diane dan Abigail Thernstrom (ed.), *Demokrasi Klasik dan Modern: Tulisan Tokoh-Tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*, terj. Hermono, cet.I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Rumadi, *Mayarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: PT. Gugus Press, 2002.
- Said, Edward W., *Kebudayaan Dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik*, alih bahasa Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Sheriden, Noel, *Marocco in pictures*, New York: Serling Publishing co.inc, 1972.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, terj. I. Made Krisna, cet.I, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2003.
- Subhan, Arief, (ed.), *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, cet.I, Jakarta: LSAF, 1999.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tamara, M. Nasir dan Elza peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Yasin, Rahman, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: AK. Group, 2006.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, cet.I, Jakarta: Teraju, 2002.
- Zortman, William, *Marocco, Problem Of New Power*, New York: Atheton Press, 1964.

Kelompok Lainnya

- Anas, Muhammad, *Kritik Ilmu Pengetahuan Jurgen Habermas dan 'Abid Al-Jabiri: Studi Komparasi Epistemologi*, Skripsi, Yogyakarta, UIN, 2005.
- Abduh, Muhammad, *Format Ideal Demokrasi Di dunia Arab: Tela'ah atas Pemikiran Politik Al-Jabiri*, Skripsi, Yogyakarta, UIN, 2005.
- Baso, Ahmad, "Problem Islam dan Politik; Perspektif "Kritik Nalar Politik" Muhammad 'Abid al-Jabiri", dalam jurnal *Taswirul Afkar*, edisi no.4, tahun 1999.
- Jihad, Zayyin Alfi, *Intuisi menurut Muhammad 'Abid al-Jabiri*, Skripsi, Yogyakarta: UIN, 2004.
- Kailani, Najib, *Pemikiran Politik Islam al-Jabiri*, Skripsi, Yogyakarta: UIN, 2002.
- Kahar, Novriantoni, "al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam: Sebuah Penjajakan Awal" dalam makalah Diskusi Bulanan Jaringan Islam Liberal Tentang *Nalar Politik Arab dan Islam: Review Atas Pemikiran Mohammad 'Abid al-Jabiri*. Teater Utan Kayu, 30 Juni 2004.
- Nur, Muhammad, "*Islam Berbicara Tentang Cita-cita Politik Indonesia Baru*", dalam *Asy-Syir*'ah, Vol. 36, No.1, 2002.
- Raharjo, Dawam, "*Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal*", dalam *Paramadina*, Vol. I, No. I, 1999.
- Sayuthi, Anwariyyah dan Zuhairi Misrawi, "*Nalar Etika: Civil Society atau Negara?*" Dalam *Taswirul Afkar*, No. II, 2001
- Suwondo, Kutut, "Desentralisasi dan Demokrasi Lokal", Makalah disampaikan pada seminar sehari dan peluncuran buku tentang "Demiliterisasi, Demokratisasi, dan Desentralisasi" sebagai pemakalah, Yogyakarta, 12 Juni 2002.
- Wahid, Abdurrahman, "Demokrasi Dalam Pengertian Kita," <http://GusDur.net>, akses 19 September 2006.
- _____, "Esai Khusus Abdurrahman Wahid Masih Perlukah Formalisme Agama?," <http://GusDur.net>, akses 10 September 2006.
- _____, "Agama dan Demokrasi," <http://GusDur.net>, akses 19 September 2006.

Zulfikar, Kritik Epistemologi *Nalar Arab Menurut 'Abid Al-Jabiri*, Skripsi,
Yogyakarta: UIN, 2001.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA